



PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) DI KOTA MAGELANG

Sri Haryati ✉

Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Management

Finance

SMP RSBI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model inovatif tentang manajemen pembiayaan satuan pendidikan berbasis kegiatan pada SMP RSBI di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari studi pendahuluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP RSBI di Kota Magelang telah melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis kinerja melalui empat tahap yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penelitian ini juga menemukan pola manajemen pembiayaan di satuan pendidikan yang berupa SOP Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan model penghitungan unit cost per siswa per tahun per satuan pendidikan. Kedua model tersebut telah diujicoba dan terbukti efektif. Namun perlu direkomendasikan agar pemberlakuan SOP dan penghitungan BOSP dilakukan secara menyeluruh disemua satuan pendidikan di Kota Magelang. Model pengembangan manajemen pembiayaan dan penghitungan biaya operasional satuan pendidikan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka acuan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan manajemen pembiayaan dengan menerapkan rincian kegiatan SOP dan komponen-komponen penghitungan BOSP. Satuan Pendidikan khususnya di Kota Magelang hendaknya menggunakan SOP manajemen pembiayaan agar input, proses, output, dan outcomes dari pelaksanaan manajemen pembiayaan dapat bermutu dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para stakeholder pendidikan.

Abstract

The objective of this research is to find out the innovative model about finance management education unit based on the activity in RSBI Junior High School In Magelang. model This research uses Research and Development method. The analysis of descriptive qualitative is used to analyze the data and information which is gained from introduction study. The result shows that SMP RSBI in Magelang town has applied finance management education based action through 4 steps: planning, organizing, action, monitoring, and evaluation. This research also finds out financial management pattern in educational unit that is SOP of financial education management and the accounting pattern in unit cost per student for each year per educational unit. Those two models have been tested and proven effectively. However the application of SOP and the accounting of BSOP must be done in entire Magelang. This model which produced in this research is expected to enable in giving the frame for educational unit in order to develop accounting management by applying the details of SOP and the components of BOSP accounting. The educational unit, especially in Magelang should use SOP financing management for the sake of the quality of input, process, output and outcomes that will lead into satisfaction of education stakeholders.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Biaya adalah besarnya dana yang diperkirakan perlu untuk disediakan pada proyek kegiatan tertentu (Gaffar, 1987:162). Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk uang yang berhubungannya dengan perolehan berbagai faktor input pendidikan, misalnya : guru, buku, gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya (Thomas, 1971:31). Batasan ini dipertegas lagi oleh Bowen (1981:XX) bahwa biaya pendidikan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu satuan pendidikan untuk mendapatkan jasa tanah, tenaga kerja, atau modal, untuk membeli barang dan jasa, atau untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008, dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Selanjutnya dikemukakan bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Secara lebih sederhana *Decentralized Basic Education* (2008:11-15) mendefinisikan biaya pendidikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan.

Di tingkat sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang habis digunakan dalam waktu satu tahun atau kurang per siswa per tahun. Biaya operasional dapat dipilah menjadi biaya operasional personil dan biaya operasional bukan personil. Dalam menghitung Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), seperti yang tercantum dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, menggunakan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk mengakomodir variasi antar sekolah. Sekolah dengan jumlah rombongan belajar berbeda akan mempunyai nilai BOSP yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian khususnya tentang penghitungan biaya operasional satuan pendidikan per tahun per siswa agar mendekati kenyataan, maka perlu memperhatikan asumsi-asumsi dasar yang meliputi: (1) penentuan kondisi sekolah yang meliputi jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah siswa per rombel, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah mata pelajaran, nilai gaji dan tunjangan; (2) penentuan

komponen biaya; (3) penentuan volume penggunaan atau pemakaian, dan (4) penentuan harga setiap komponen biaya.

Secara konseptual, pada dasarnya RSBI merupakan "SSN Plus". Dengan kata lain, semua komponen biaya yang muncul dalam SSN (Sekolah Standar Nasional) harus muncul dalam SBI/RSBI. Yang diperlukan kemudian adalah mengidentifikasi tambahan komponen biaya apa saja yang harus ada di SBI/RSBI. Sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia membawa perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola pembiayaan pendidikan di wilayah masing-masing. Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif. Secara positif desentralisasi pengelolaan biaya pendidikan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sustainabilitas, keefektifan maupun efisiensi karena pemerintah daerah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakatnya sehingga memiliki keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat. Namun karena keterbatasan kemampuan dan komitmen para pengelola biaya pendidikan daerah yang sangat beragam, muncullah berbagai masalah pengelolaan biaya pendidikan yang justru mengurangi transparansi, akuntabilitas, sustainabilitas, keefektifan dan efisiensi pengelolaan biaya tersebut. Untuk itu diperlukan model manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar yang merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota dan dukungan partisipasi masyarakat yang sampai sekarang belum secara jelas bagaimana model pengelolaan pembiayaannya.

Sistem desentralisasi yang dilaksanakan sejak Januari 2001 membawa perubahan yang sangat besar dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang kecuali pendidikan tinggi. Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Daerah memiliki hak dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola seluruh pembiayaan pendidikan. Secara teoretis pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan pendidikan kepada pemerintah yang berada di level bawah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sustainabilitas, keefektifan dan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan. Mengingat pemerintah daerah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan lebih memiliki keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-

benar dibutuhkan masyarakat di wilayah masing-masing. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh bisa lebih cepat dan tepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari adalah munculnya kompetisi atau persaingan antardaerah yang akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintahnya (Davoodi dan Zou dalam Puji Wibowo, 2008:61). Sejalan dengan hal tersebut, Oates (1993:239) juga berpendapat bahwa desentralisasi pengelolaan keuangan berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintah. Namun secara empiris, di Indonesia pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pembiayaan pendidikan mengalami banyak hambatan. Tiga yang utama adalah (1) keterbatasan kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan karena besarnya APBD tersedia yang rendah, dan (2) komitmen para pengelola pembiayaan pendidikan yang sangat beragam, serta (3) kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas (Supriyadi, 2006:11).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan model inovatif tentang manajemen pembiayaan satuan pendidikan berbasis kegiatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Magelang. Temuan model tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk membantu memecahkan permasalahan pengelolaan biaya pendidikan sehubungan dengan banyaknya kegiatan pengembangan yang direncanakan, memperbaiki sistem penghitungan biaya operasional pendidikan di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat terwujud sistem pembiayaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Sebagaimana dijelaskan Borg and Gall (1983) penelitian dan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan sebagaimana yang disarankan oleh Borg dan Gall (1983) tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup:

(1) studi kualitatif, (2) review literatur, (3) pengembangan model, dan (4) evaluasi model, dan (5) ujicoba model. Fokus penelitian ini dibatasi pada SMP RSBI. Alasannya adalah bahwa belum ada peraturan dan sistem yang secara khusus mengatur sistem manajemen pembiayaan untuk jenis satuan pendidikan ini. Banyak peraturan telah dilaksanakan untuk mengatur hal tersebut pada jenjang satuan pendidikan umum atau reguler, namun sistem pembiayaan RSBI menjadi perkecualian.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari studi pendahuluan. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang peran sekolah, kepala sekolah, guru, bendahara, staf tata usaha, komite sekolah, orang tua siswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Analisis deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menafsirkan hasil analisis kuantitatif dan memperoleh gambaran tentang kelemahan model yang divalidasi dan diuji cobakan di lapangan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan mengembangkan model. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis deskripsi kasus. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui: (1) tingkat kemampuan para pengelola manajemen pembiayaan, yang meliputi tingkat pemahaman, kemampuan dalam merencanakan, kemampuan dalam melaksanakan, dan kemampuan dalam mengendalikan; (2) tingkat kompetensi para pelaksana/pengelola anggaran yang meliputi kompetensi personal, kompetensi social, dan kompetensi profesional; (3) tingkat kepuasan layanan.

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas model yang diuji coba di lapangan. Tingkat keefektifan model ditunjukkan melalui perbandingan rerata perolehan hasil kemampuan peserta pelatihan dan tingkat kepuasan layanan. Analisis statistik dengan menggunakan komputer program SPSS 11.5. Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata (*mean*) antara *pretest* (sebelum *treatment*) dengan *posttest* (sesudah *treatment*). Analisis chi kuadrat digunakan untuk mengetahui hubungan antar sub variabel dari variabel kemampuan para pengelola anggaran. Variabel kemampuan para pengelola meliputi sub variabel tingkat pemahaman, kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan biaya. Analisis korelasi *product moment* digunakan untuk mengetahui hubungan antar sub variabel kepuasan layanan.

Hasil dan Pembahasan

Proses penyusunan RAPBS pada semua satuan pendidikan sudah melibatkan *stakeholder* yang ada di sekolah. Ini menunjukkan terlaksananya delegasi dan partisipasi semua warga sekolah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan satuan pendidikan. Sumber biaya pendidikan pada umumnya berasal dari bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah propinsi, bantuan pemerintah kota, dan sumbangan masyarakat. Bantuan pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Blockgrant* RSBI dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bantuan Pemerintah Propinsi berupa *blockgrant* RSBI. Bantuan Pemerintah Kota Magelang berupa gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil, dan Subsidi Bantuan Sekolah (SBS). Sumbangan masyarakat berasal dari orang tua siswa. Penentuan pos-pos pengeluaran telah didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan yang telah direncanakan dalam APBS. Desain RAPBS diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Magelang. Penyusunan usulan program kegiatan dan penganggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Proses perencanaan dimulai dengan evaluasi APBS tahun sebelumnya, identifikasi kebutuhan tahun ini, penyusunan prioritas kegiatan, perumusan anggaran kegiatan, dan sosialisasi secara internal. Perencanaan anggaran dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Oktober (kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 4 bulan) RAPBS banyak yang belum selesai dan belum disahkan Kepala Dinas Pendidikan. Dalam penyusunan perencanaan anggaran banyak sekolah tidak mengawali dengan analisis kebutuhan (*need assesment*), lingkungan internal, dan lingkungan eksternal atau analisis SWOT. Dengan tidak dilakukannya analisis kebutuhan secara menyeluruh, banyak satuan pendidikan terpaksa harus menyalahi atau tidak mematuhi rencana anggaran. Kurangnya pengendalian dan pemeriksaan secara internal maupun eksternal secara rutin merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan dan ketidaktepatan perencanaan anggaran.

RAPBS disusun oleh tim perumus yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan koordinator bidang pengembangan. Tim perumus ditunjuk berdasarkan kesepakatan, bertugas menyusun dan mensosialisasikan RAPBS. RAPBS yang telah disetujui Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Magelang disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali siswa melalui rapat-rapat. Ada beberapa satuan pendidikan mensosialisasikan RAPBS dengan menempelkan RAPBS

pada papan-papan pengumuman, bahkan ada yang mencantumkannya pada *website* sekolah sehingga dapat diakses oleh semua orang. Tetapi tidak semua tim pelaksana anggaran memiliki kemampuan personal, sosial, dan profesional yang berarti mereka harus jujur, transparan dan memiliki kemampuan tentang manajemen keuangan. Terbukti pada tahun 2009/2010 dari 106 satuan pendidikan di Kota Magelang, hanya 3 satuan pendidikan yang RAPBS-nya disahkan Kepala Dinas Pendidikan. Demikian juga tahun 2010/2011, hingga akhir bulan Oktober masih ada satuan pendidikan yang masih mengumpulkan orang tua siswa untuk menggali dana untuk penyusunan anggaran, dan baru 7 (tujuh) satuan pendidikan yang telah menyerahkan RAPBS kepada Dinas Pendidikan.

RAPBS yang telah dirumuskan tim, disetujui oleh warga sekolah, komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua/wali siswa, untuk kemudian ditetapkan sebagai APBS. Semua kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan berdasarkan APBS. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran terjadi perubahan, hal tersebut dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan anggaran perubahan. Pencairan dana dilakukan dengan pengajuan dana kepada kepala sekolah atau bendahara sekolah. Data lain yang ditemukan peneliti terkait dengan sistem pelaksanaan anggaran pendidikan SMP RSBI di Kota Magelang adalah sebagai berikut.. Pertama, masih ada satuan pendidikan yang tidak memasukkan semua sumber dana ke RAPBS; Kedua, sering ditemukan adanya ketidaktepatan penggunaan anggaran pada beberapa satuan pendidikan. Yang paling sering adalah pendayagunaan BOS yang digunakan untuk membiayai pengeluaran non-operasional atau yang tidak sesuai peruntukannya.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak tahap: (1) perencanaan pada saat penyusunan dan penghitungan RAPBS, (2) pelaksanaan pada saat pengajuan dan pencairan dana kegiatan, dan (3) pelaporan kegiatan masing-masing program atau pelaporan terpadu pada akhir tahun pelajaran. Monev dilaksanakan oleh penanggung jawab program, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan badan kepengawasan. Tetapi monitoring dan evaluasi tersebut tidak dilaksanakan secara terencana atau terprogram. Walaupun semestinya minimal setiap bulan dilakukan pemeriksaan dan pelaporan oleh kepala sekolah, dan setiap triwulan dilakukan pelaporan secara terpadu penggunaan uang ke Dinas Pendidikan Kota Magelang, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terprogram dan berkesinam-

Tabel 1. Unit Cost Persiswa Satuan Pendidikan Dasar Kota Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011

Sekolah	Biaya Total			Jml Ssw	Unit Cost persiswa per tahun		Unit Cost persiswa per bulan	
	P	NP	JT		P	NP	P	NP
SMP N 1	2.346.169.306	1.852.236.544	4.198.405.850	495	4.739.736	3.741.892	394.978	311.824
SMP N 2	1.446.771.846	1.383.993.062	2.830.764.908	479	3.020.400	2.889.338	251.700	240.778

Tabel 2. Rekapitulasi Total Biaya, Pemasukan, dan Kekurangan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar Kota Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011

Nama Sekolah	Jml Biaya Total	Jml Siswa	BOSP per tahun	Pemasukan-Pemasukan					Kekurangan Biaya
				BOS	RSBI/ DIPA	Pdp BOS	Bantuan Sosial/ BSM	SBS	
SMP N 1	4.198.405.850	495	3.741.892	575.000	1.414.141	-	-	79.910	1.672.841
SMP N 2	2.830.764.908	479	2.889.338	575.000	1.461.378	-	-	240.000	562.960

bugan.

Upaya peningkatan mutu manajemen pembiayaan dilakukan dengan cara setiap awal tahun satuan pendidikan mengadakan rapat atau *workshop* untuk mengevaluasi program dan anggaran tahun sebelumnya. Materi evaluasi ini digunakan sebagai acuan/pedoman untuk penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya. Manajemen pembiayaan SMP RSBI di Kota Magelang tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (1) kelemahan dalam prosedur manajemen pembiayaan, yakni belum adanya standar yang jelas yang dijadikan sebagai acuan dan jaminan mutu pelayanan minimal dan tolok ukur kinerja, dan (2) kelemahan dalam menghitung *unit cost* per siswa per sekolah, yakni rata-rata biaya operasional pendidikan per siswa per tahun per sekolah, (3) kelemahan memilih tim pelaksana, yakni pelaksana anggaran yang mempunyai kompetensi personal, sosial, dan profesional. Ketiga kelemahan dasar tersebut menyebabkan RAPBS tidak dapat selesai disusun dengan tepat waktu, tepat dana dan tepat sasaran.

Komponen-komponen yang tercakup di dalam SOP manajemen pembiayaan satuan pendidikan RSBI adalah: (1) prosedur mutu perencanaan dan pengorganisasian pembiayaan; (2) prosedur mutu pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan pembiayaan, serta perbaikan mutu manajemen. Tahap perencanaan dan pengorganisasian meliputi kegiatan: (1) pembentukan tim penyusun RPS; (2) analisis SWOT; (3) penyusunan RKS; dan (4) penyusunan RAPBS termasuk di dalamnya penghitungan BOSP. Tahap pelaksanaan, pemeriksaan, pelaporan dan perbaikan mutu manajemen meliputi kegiatan: (1) pengajuan dana *Blockgrant* RSBI; (2) pengajuan dana

BOS; (3) pengajuan dana SBS; (4) pengambilan gaji; (5) penggalangan dana dari masyarakat; (6) transaksi pembayaran dan pelaporan dana kegiatan; (7) pelaporan terpadu, dan (8) perbaikan mutu manajemen. Hasil validasi pengembangan model konseptual manajemen pembiayaan baik dengan *Focussed Group Discussion* (FGD) dan Teknik *Delphi* diperoleh hasil sebagai berikut : (1) pembentukan tim penyusun RPS dilaksanakan minggu pertama bulan Maret, (2) analisis SWOT dilaksanakan minggu ke 2 dan 3 bulan Maret, (3) penyusunan RKS dilaksanakan bulan April dan Mei, (4) penyusunan RAPBS dilaksanakan bulan Juni s/d Juli, dan (5) penggalangan dana masyarakat dilaksanakan bulan September. Berdasarkan tahapan yang disepakati dalam *Focussed Group Discussion* dan teknik *Delphi* tersebut, maka model operasional yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah penghitungan BOSP yang merupakan tahapan prosedur penyusunan RAPBS yang kebetulan baru berlangsung di satuan pendidikan RSBI di Kota Magelang.

Berdasarkan data yang diperoleh, yang berikut merupakan hasil penghitungan BOSP pada dua satuan pendidikan RSBI di Kota Magelang.

Berdasarkan hasil penghitungan Tabel 1, dapat dikemukakan data kekurangan biaya operasional per siswa, per tahun, per sekolah.

Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ini sangat efektif, karena hasil analisis data dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang dilaksanakan dengan menghitung biaya operasional satuan pendidikan ternyata memiliki dampak positif terhadap kemampuan pengelola anggaran dalam menguasai sistem penghitungan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP).

Perhitungan perbedaan rerata terhadap penguasaan penghitungan BOSP pada pengelola anggaran sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan penghitungan BOSP menunjukkan perbedaan yang signifikan ($t = 7,877$). Rerata sebelum pelatihan sebesar 48,39, dan rerata setelah pelatihan sebesar 63,75.

Simpulan

SMP RSBI di Kota Magelang telah melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis kinerja. Kegiatan manajemen tersebut dilaksanakan melalui empat tahap yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Namun ditemukan banyak masalah terutama yang bersumber pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan pembiayaan sekolah. Tiga penyebab utama masalah tersebut adalah (a) belum adanya standar operasional prosedur pengelolaan pembiayaan sekolah, (b) belum adanya sistem penghitungan biaya operasional sekolah yang merupakan dasar pengelolaan pembiayaan sekolah, dan (c) belum adanya sistem pemilihan tim pengelola pembiayaan sekolah berdasarkan kompetensi personal, social, dan professional yang memadai. Penelitian ini juga menemukan pola manajemen pembiayaan di satuan pendidikan yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan model penghitungan *unit cost* per siswa per tahun per satuan pendidikan. Kedua model tersebut telah diujicoba dan terbukti efektif.

Peneliti merekomendasikan pemberlakuan SOP dan penghitungan BOSP secara menyeluruh, di semua satuan pendidikan di Kota Magelang. Model pengembangan manajemen pembiayaan dan penghitungan biaya operasional satuan pendidikan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka acuan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan manajemen pembiayaan dengan menerapkan rincian kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan komponen-komponen penghitungan BOSP yang telah disajikan dalam penelitian ini. Satuan Pendidikan khususnya di Kota Magelang hendaknya menggunakan standar operasional prosedur (SOP) manajemen pembiayaan hasil penelitian ini, agar input, proses, *output*, dan *outcomes* dari pelaksanaan manajemen pembiayaan dapat bermutu dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para stakeholder pendidikan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balitbang Dikbud. 1996. *Analisis Misi dan Visi Pembangunan Pendidikan MP-02*. Jakarta: Depdikbud.
- . 1989. *Analisis Biaya*. Jakarta: Depdikbud.
- . *Buku T5. Penyusunan Rencana, Program dan Penganggaran*. Jakarta: Depdikbud.
- . 1995. *Efisiensi Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Borg. W.R. dan Gall, M.D. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman.
- Bowen, Hobart R.,, 1981. *The Cost of Higher Education*. London : Jossey-Bass Publishers.
- Cohn, Elchanan. A979. *The Economics of Education*. University of South Carolina. Cambridge, Massachusetts.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas: Jakarta.
- . 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Depdiknas.
- . 2004. Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 *tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas.
- . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*. Jakarta : Depdiknas.
- . 2005. *Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009*. Jakarta. Depdiknas.
- . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas.
- . 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 *Tentang Wajib Belajar*. Jakarta : Depdiknas.
- . 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 *Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 2009. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta: Depdiknas.
- 2010. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengelolaan Keuangan Monitoring dan Evaluasi*. Jakarta: Depdiknas.
- Hallak, J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan (Alih Bahasa oleh Harso)*. Jakarta : Bharata Karya Aksara.

- Hartley, Harry J. 1968. *Educational Planning Programing Budgeting A System Approach*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- John, Roc L. Morphet, Edgor L. 1975. *The Economics & Financing of Education A System Approach*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Jones, Thomas. H.. 1985. *Introduction to School Finance Technique and Sosial Policy*. New York : Prentice Hall Inc.
- Oates, WE. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal LXXVI (2) : 237-43*.
- Parrish, Thomas B., Fran O, Reilly. E. Duenas and Jean Wolman. 2009. *State Education Finance System*. California : American Institute for Research.
- Pemerintah Kota Magelang. 2003. *Instruksi Walikota Magelang Nomor: 900/34/122/Tahun 2003 tentang Manajemen Keuangan Sekolah Kota Magelang dengan Pendekatan Anggaran Kinerja*. Magelang: Pemkot.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarno. 1996. *Strategi Pembangunan Pendidikan. MP.05*. Jakarta : Depdikbud.
- Supriyadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Ace. Tilaar. 1996. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thomas, J. Allan. 1971. *The Productive School – A System Analysis Approach to Educational Adminstration*. New York : John Willy & Sons. Inc.
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5 No. 1 2008 (Hal 55-83)*.